

Pengurusan E-KTP Pelajar Meningkat saat Libur



JADI JUJUKAN: Pelayanan KTP di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo.

KOTA-Masa libur sekolah akhir tahun dimanfaatkan ribuan pelajar di Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus KTP elektronik (e-KTP). Dampaknya, jumlah perekaman KTP mengalami lonjakan signifikan, dengan rata-rata mencapai 320 orang per hari selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo mencatat lonjakan tersebut terjadi pada periode 24 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan hari normal yang rata-rata hanya seki-

tar 190 pemohon per hari.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, mengatakan peningkatan perekaman KTP saat libur sekolah didominasi oleh pelajar yang baru memasuki usia wajib KTP.

"Pada hari biasa di bulan Desember, rata-rata perekaman sekitar 190 orang per hari. Namun selama libur Nataru kemarin melonjak hingga 320 orang per hari. Ada kenaikan sekitar 130 permohonan atau sekitar 68,4 persen," ujar Reddy, Selasa (13/1).

Selama periode libur Nataru, tercatat total 1.601 permohonan perekaman

● Ke Halaman 10



Pengurusan KTP...

KTP elektronik. Menurut Reddy, para pelajar sengaja memanfaatkan waktu libur sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar.

"Mayoritas pemohon adalah pelajar yang baru genap berusia 17 tahun. Mereka memanfaatkan libur sekolah untuk mengurus KTP," jelasnya.

Setelah masa libur berakhir, jumlah pemohon perekaman KTP mulai kembali normal. Dalam dua hari terakhir,

rata-rata perekaman berada di kisaran 195 orang per hari.

Untuk mengantisipasi antrean panjang, Disdukcapil Sidoarjo memaksimalkan layanan perekaman di tingkat kecamatan agar tidak terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Perekaman kini lebih banyak dilakukan di kecamatan untuk mengurangi kepadatan antrean di MPP. Blanko KTP juga sudah kami distribusikan, masing-masing kecamatan menerima sekitar 1.500 keping," terangnya.

Selain layanan perekaman KTP, Disdukcapil Sidoarjo juga memberikan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pelajar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan capaian IKD sekaligus mempermudah akses layanan administrasi kependudukan ke depan.

"Sekalian kami bantu aktivasi IKD agar ke depan anak-anak lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital," pungkasnya. (dik/vga)





KETAT: Pegawai Lapas Sidoarjo saat akan tes urine.

Komitmen Bebas Narkoba, Lapas Sidoarjo Tes Urine Seluruh Pegawai

KOTA-Mengawali tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Seluruh pegawai, tanpa terkecuali, mengikuti tes urine guna memastikan institusi pemasyarakatan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kepala Lapas Kelas

IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan wujud keseriusan dalam menjaga marwah organisasi pemasyarakatan.

Menurutnya, tes urin merupakan langkah nyata untuk membangun lingkungan kerja yang profesional dan bebas narkoba.

● Ke Halaman 10

Komitmen Bebas Narkoba,...

“Ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi langkah penting untuk menjaga integritas seluruh pegawai,” ujarnya, Selasa (13/1).

Tes urine dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas IIA Sidoarjo dan diikuti

seluruh jajaran pegawai, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana. Proses pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan transparan, serta berada di bawah pengawasan ketat guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya preventif Lapas Sidoarjo da-

lam mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba.

Disri menambahkan, pegawai pema-syarakatan memiliki peran strategis dan dituntut mampu menjadi teladan bagi masyarakat. (sur/vga)

Bengkel, Rumah, dan Warkop di Sedati Terbakar

Satu Orang Luka Ringan

SEDATI-Kebakaran melanda sebuah bengkel yang juga difungsikan sebagai rumah serta warung kopi di Jalan Sedati Agung, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/1) sore. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun satu orang dilaporkan mengalami luka bakar ringan.

Humas BPBD Damkar Sidoarjo, Yoli Wisnu, mengatakan objek yang terbakar meliputi bengkel sekaligus rumah milik M. Tuni Setiawan dengan luas sekitar 135 meter persegi.

Selain itu, api juga menghancurkan sebuah warung kopi beserta isinya milik Imam dengan luas kurang lebih 120 meter persegi.

“Objek kebakaran meliputi bengkel dan rumah milik M. Tuni Setiawan. Kebakaran juga menghancurkan warung kopi beserta isinya milik Imam,” ujar Yoli Wisnu.

Laporan kebakaran diterima petugas melalui Call Center 112 pada pukul 16.37 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran dari Posko Waru dan Posko Buduran langsung

● Ke Halaman 10



LUDES: Kondisi bangunan di Jalan Sedati Agung, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati yang terbakar.



Bengkel, Rumah, ...

diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran.

“Begitu laporan masuk, tim langsung bergerak ke lokasi. Alhamdulillah api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan lain,” jelasnya.

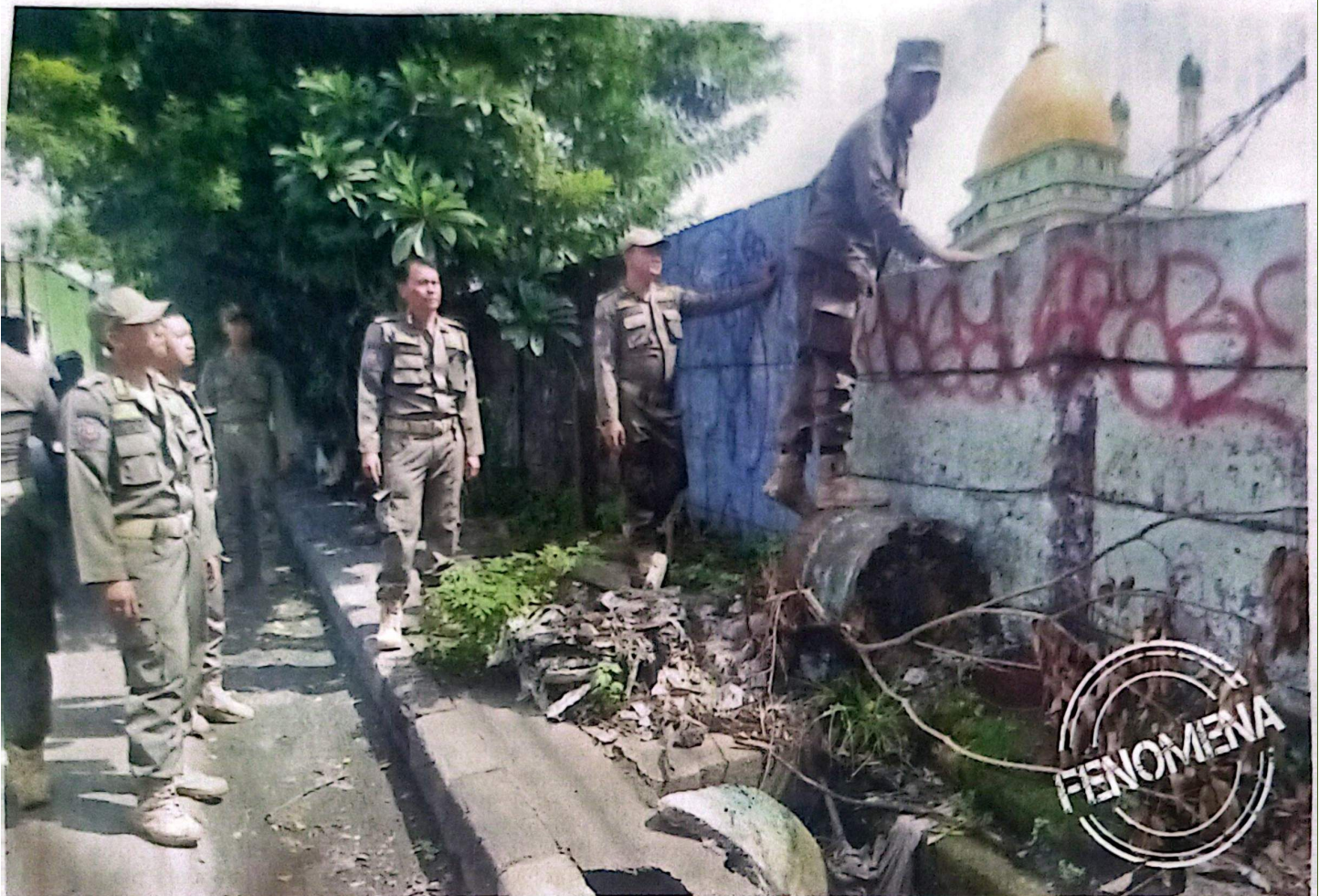
Proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam dan dinyatakan selesai sekitar pukul 18.00 WIB. Dalam kejadian tersebut, seorang korban bernama Yudi mengalami luka bakar ringan di bagian jem-

pol tangan akibat terkena api saat peristiwa berlangsung.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, kerugian material akibat kebakaran belum dapat dipastikan. “Untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui dan akan dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian,” tambah Yoli.

BPBD Sidoarjo memastikan tidak ada kendala berarti selama proses pemadaman dan kondisi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman serta kondusif. (sur/vga)





TEGAS: Satpol PP Sidoarjo Tertibkan PKL dan membawa sejumlah barang di kawasan sekitar Flyover Waru, Selasa (13/1)

Satpol PP Tertibkan PKL di Sejumlah Titik

Upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas terus dilakukan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Sejak Selasa (13/1) pagi, petugas menyisir sejumlah ruas jalan utama hingga kawasan Alun-Alun Sidoarjo untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

KEBERADAAN PKL di bahu jalan dinilai melanggar aturan serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Penertiban difokuskan di sejumlah titik rawan,



antara lain Jalan Sultan Agung, Jalan Raya Buduran, Jalan Raya Gedangan, Jalan Raya Waru, kawasan Alun-Alun Sidoarjo, serta sekitarnya.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, AP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas).

"Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, khususnya di jalur-jalur utama yang padat aktivitas," ujar Novianto.

● Ke Halaman 10

Satpol PP...

Penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah PKL yang masih berjualan di bahu jalan, terutama di kawasan Jalan Raya Waru.

Salah satunya PKL yang berjualan

di depan Unimas District, Waru. Petugas langsung melakukan penertiban dan mengamankan barang bukti berupa dorkas untuk dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP.

Selain itu, petugas juga menertibkan alat peraga milik PKL penjual bunga yang ditinggalkan di lokasi, tepatnya di bawah Flyover Waru.

Tidak hanya melakukan penindakan, Satpol PP juga memberikan imbauan dan sosialisasi kepada penjual bensin eceran serta tambalan yang berjualan di sisi rel kereta api Jalan Raya Waru. Mereka diminta segera berpindah tempat dan mengemasi peralatan demi keselamatan bersama.

"Kami mengedepankan imbauan dan sosialisasi. Penindakan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang jelas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan patroli dari Jalan Ahmad Yani ke arah utara hingga Jalan Raya Waru, termasuk pengawasan di

pintu keluar Terminal Bungurasih. Seluruh barang bukti hasil penertiban dibawa ke Mako Satpol PP untuk proses lebih lanjut.

"Alhamdulillah, selama patroli dan penertiban berlangsung tidak ada kendala berarti. Situasi tetap aman dan kondusif," pungkas Novianto. (dik/vga)

Mantan Bupati Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi

- Rusunawa Tambaksawah
- Tatap Muka dan Vi Zoom



BERLANJUT: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kembali digelar di Pengadilan Tipikor.

KOTA-Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (12/1) sore. Dalam perkara yang menjerat empat mantan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo itu, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Ahmad Mu-

dhlor Ali (via zoom), serta Kepala Dinas DP2CKTR, M Bachruni Aryawan.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Win Hendrarso menjelaskan bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan barang milik pemerintah daerah yang berasal dari hibah pemerintah pusat. Ia menyebut aset tersebut baru disahkan sebagai aset daerah pada tahun 2023, meskipun proses kerja sama pengelolaannya telah berlangsung jauh sebelumnya.

● Ke Halaman 10

Mantan Bupati...

Win yang menjabat sebagai Bupati Sidoarjo pada periode 2005–2010 mengungkapkan, perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan rusunawa telah ditandatangani pada tahun 2006 dan diperbarui kembali pada 2010. Saat itu, Sulaksono yang kini menjadi salah satu terdakwa belum menjabat sebagai kepala dinas.

“Pernah ada penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan catatan tertentu. Karena ini hibah dari pemerintah pusat, maka harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Win dalam persidangan.

Ia mengaku lupa apakah pernah menerbitkan Surat Keputusan (SK)

yang secara khusus menetapkan Rusunawa Tambaksawah sebagai aset daerah. Namun menurutnya, penetapan aset tidak selalu harus berbentuk SK, melainkan dapat melalui mekanisme pencatatan barang milik daerah sesuai peruntukannya.

Win juga menegaskan bahwa tanggung jawab teknis pengelolaan rusunawa berada pada DP2CKTR. Selama masa kepemimpinannya, ia mengaku tidak pernah menerima laporan adanya permasalahan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah.

Sementara itu, Bachruni yang mulai menjabat sebagai Kepala DP2CKTR pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada SK khusus yang mengatur pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Menurutnya, pengelo-

laan hanya berpedoman pada PKS yang dibuat pada tahun 2006 dan 2010.

“Dalam PKS lama tidak disebutkan secara rinci hak dan kewajiban DP2CKTR. Baru pada PKS tahun 2023 pengaturannya lebih jelas karena pengelolaan sudah ditarik ke pemerintah daerah,” jelas Bachruni.

Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024 baru diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif sewa Rusunawa Tambaksawah. Selain itu, Bachruni mengakui adanya pelanggaran berupa penggunaan tanah kas desa sebagai lokasi pembanguan rusunawa.

Dalam persidangan tersebut turut diungkap potensi pendapatan Rusunawa Tambaksawah. Berdasarkan perhitungan, penghasilan maksimal rusunawa

tersebut mencapai Rp 783 juta per tahun. Namun, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016, terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp 29 juta yang disebut telah dilunasi secara bertahap.

Jaksa juga menghadirkan saksi Nanang Budiarto, mantan Kepala UPTD Rusunawa. Ia menyatakan tidak mengelola Rusunawa Tambaksawah karena telah ada PKS dengan pihak ketiga. Menurut Nanang, rusunawa lainnya dikelola oleh UPTD, sedangkan Rusunawa Tambaksawah baru sepenuhnya dikelola UPTD sejak tahun 2024. Ia mengaku baru menge-

tahui status Rusunawa Tambaksawah sebagai aset daerah setelah terbit SK pada tahun 2018.

Untuk diketahui, empat mantan Kepala DP2CKTR terseret dalam kasus korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Mereka didakwa lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 9,7 miliar. Keempat terdakwa tersebut adalah Sulaksono (Kepala Dinas periode 2007–2012 dan 2017–2021), Dwijo Prawito (2012–2014), Agoes Boedi Tjahjono (2015–2017), serta Heri Soesanto (Pelaksana Tugas tahun 2022). (sur/vga)

Bengkel, Rumah, ...

diterjunkan ke lokasi dengan menge-

pol tangan akibat terkena api saat peristiwa berlangsung.

Hingga kini, penyebab kebakaran



Mitra Keluarga Resmikan RS Ke-22

SIDOARJO, SURYA - Jaringan Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga kembali memperluas layanannya dengan meresmikan RS Mitra Keluarga Sidoarjo di Jalan KH Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Selasa (13/1).

Kehadiran rumah sakit ini menandai unit ke-22 Mitra Keluarga di Indonesia sekaligus memperkuat akses layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Peresmian rumah sakit itu dihadiri langsung Bupati Sidoarjo, Subandi. RS Mitra Keluarga Sidoarjo dibangun di atas lahan seluas 1,2 ha dengan kapasitas 100 tempat tidur yang melayani kelas I, II, III, hingga eksekutif.

Di sela acara, Subandi berharap rumah sakit ini dapat melayani pasien umum, asuransi perusahaan, BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Bertambahnya fasilitas kesehatan seperti di Sidoarjo, masyarakat akan semakin terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan manusiawi," kata Subandi.

Ia juga berharap RS Mitra Keluarga Sidoarjo menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, swasta,



SURYA/DOK KOMINFO SIDOARJO.

RUMAH SAKIT KE-22 - Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri acara peresmian RS Mitra Keluarga Sidoarjo, Selasa (13/1).

dan masyarakat merupakan kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

Direktur Regional RS Mitra Keluarga, dr Sri Mawarti, menyampaikan peresmian RS Mitra Keluarga Sidoarjo bertepatan dengan peringatan ulang tahun Mitra Keluarga ke-37.

"Kami berkomitmen penuh

memberi layanan kesehatan bermutu tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien, didukung teknologi serta kompetensi unggulan. Kehadiran rumah sakit ini tidak hanya menambah fasilitas kesehatan, tetapi juga memberi nilai dan harapan baru bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya," ujarnya. (ufi)

PENGUMUMAN TENTANG PENYEDIAAN DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP III (KETIGA) HARTA PAILIT PT. INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING (DALAM PAILIT) YANG TERJUAL PERKARA NO. 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas kepailitan PT. Innovative Plastic Packaging (Dalam Pailit) jo. Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini kami mengumumkan bahwa kami menyediakan Daftar Pembagian Tahap III (Ketiga) dari Harta Pailit PT. Innovative Plastic Packaging (Dalam Pailit) yang Terjual, di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan. Bahwa Para Pihak yang berkepentingan, dipersilahkan untuk melihat Daftar tersebut.

Bahwa pengumuman ini berlaku bagi Debitor Pailit, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan.

Surabaya, 14 Januari 2026

TIM KURATOR
PT. INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING (DALAM PAILIT)



Bupati Sidoarjo Resmikan Secara Simbolis RS Mitra Keluarga Berkapasitas 100 Bed

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, meresmikan RS. Mitra Keluarga Sidoarjo yang berlokasi di Jalan K.H. Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Senin (12/1/2026). Peresmian dilakukan secara simbolis dengan prosesi penggungtingan pita sebagai tanda peresmian. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan bahwa kesehatan merupakan

kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. "Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan seperti RS. Mitra Keluarga ini, masyarakat Sidoarjo akan semakin terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan manusiawi," ujarnya.

Ia juga berharap RS. Mitra Keluarga Sidoarjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang

optimal. "Pelayanan harus diutamakan. Jika ada pasien yang membutuhkan penanganan segera, layani terlebih dahulu, administrasi bisa menyusul. Jangan sampai prosedur menghambat keselamatan pasien," tegasnya.

Direktur Regional RS. Mitra Keluarga, dr. Sri Mawarti, M.M, menyampaikan bahwa Mitra Keluarga Sidoarjo merupakan rumah sakit ke-22 dalam jaringan Mitra Keluarga dan bertepatan dengan peringatan ulang tahun Mitra Keluarga ke-37. "Kami berkomitmen penuh untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu

tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien, serta teknologi dan kompetensi unggulan. Kehadiran rumah sakit ini bukan hanya menambah fasilitas kesehatan yang ada, tetapi memberikan nilai dan harapan baru bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Saat ini dengan hadirnya Mitra Keluarga Sidoarjo, maka 90% dari seluruh karyawan Mitra Keluarga Sidoarjo adalah warga dari Sidoarjo," ujarnya.

Rumah Sakit Mitra Keluarga Sidoarjo dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 100 tempat tidur

untuk kelas I, II, III, dan eksekutif. Rumah sakit tersebut didukung berbagai layanan spesialis, antara lain spesialis anak, obstetri dan ginekologi (kandungan), penyakit dalam, saraf, jantung, dan bedah. Selain itu, RS. Mitra Keluarga Sidoarjo juga memiliki sejumlah layanan unggulan (center of excellence), seperti Orthopedic Center, Woman and Children Center, serta Neurovascular Center.

Subandi berharap rumah sakit ini dapat melayani dengan baik untuk pasien umum, asuransi perusahaan, BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenagakerjaan. (Khol/Dy)

RS Mitra Keluarga Beroperasi

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi meresmikan Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Sidoarjo yang berlokasi di Jalan K.H. Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Senin sore (12/1/26). Peresmian dilakukan secara simbolis melalui prosesi pengguntingan pita sebagai tanda resmi beroperasinya fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Peresmian RS Mitra Keluarga Sidoarjo ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran rumah sakit baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Bupati Subandi menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Ia menyampaikan bahwa bertambahnya fasilitas kesehatan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan manusiawi.

"Dengan hadirnya RS Mitra Ke-

luarga Sidoarjo, masyarakat akan semakin terbantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo," ujar Subandi Senin sore (13/1/26).

Bupati juga berharap RS Mitra Keluarga Sidoarjo dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya mengedepankan pelayanan kepada pasien. "Pelayanan harus diutamakan. Apabila ada pasien yang membutuhkan penanganan segera, layani terlebih dahulu. Administrasi dapat menyusul. Jangan sampai prosedur justru menghambat keselamatan pasien," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Regional RS Mitra Keluarga, dr. Sri Mawarti, M.M., menyampaikan bahwa RS Mitra Keluarga Sidoarjo merupakan



Bupati Sidoarjo Subandi meresmikan Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Sidoarjo di Desa Pagerwojo

rumah sakit ke-22 dalam jaringan Mitra Keluarga, sekaligus bertepatan dengan peringatan ulang tahun Mitra Keluarga ke-37.

"Kami berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi, berorientasi pada keselamatan pasien, serta didukung teknologi dan kompetensi unggulan. Kehadiran RS Mitra Keluarga Sidoarjo diharapkan tidak hanya menambah fasilitas kesehatan, tetapi juga menghadirkan nilai dan harapan baru bagi masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan rumah sakit ini turut memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Saat ini, sekitar 90 persen karyawan RS Mitra Keluarga Sidoarjo merupakan warga Kabupaten Sidoarjo.

RS Mitra Keluarga Sidoarjo dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare dengan kapasitas 100 tempat tidur yang terdiri atas kelas I, II, III, dan eksekutif.

Rumah sakit ini didukung berbagai layanan spesialis, di antaran-

ya spesialis anak, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, saraf, jantung, serta bedah.

Selain itu, RS Mitra Keluarga Sidoarjo juga memiliki sejumlah layanan unggulan atau center of excellence, seperti Orthopedic Center, Woman and Children Center, serta Neurovascular Center. Rumah sakit ini diharapkan dapat melayani pasien umum, asuransi perusahaan, BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenagakerjaan dengan pelayanan yang prima. • Loe

DAFTAR

Bupati Subandi Minta Utamakan Pelayanan

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi meresmikan RS Mitra Keluarga Sidoarjo yang berlokasi di Jl KH Ali Mas'ud Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran, Senin (12/1). Ia pun meminta agar rumah sakit baru tersebut mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Pelayanan harus diutamakan. Jika ada pasien yang membutuhkan penanganan segera, layani terlebih dahulu, administrasi bisa menyusul. Jangan sampai prosedur menghambat keselamatan pasien," tegasnya.

Kata Subandi, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. "Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan seperti RS. Mitra Keluarga ini, masyarakat Sidoarjo akan semakin terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan manusiawi," ujarnya.

Ia juga berharap RS Mitra Keluarga Sidoarjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Bupati Subandi menandatangani prasasti peresmian RS Mitra Keluarga Sidoarjo. foto ist

Keluarga Sidoarjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

Direktur Regional RS Mitra Keluarga, Sri Mawarti menjelaskan, RS Mitra Keluarga Sidoarjo merupakan rumah sakit ke-22 dalam jaringan Mitra Keluarga dan diresmikan bertepatan dengan peringatan ulang tahun Mitra Keluarga ke-37.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien, serta teknologi dan kompetensi unggulan," tandasnya. (sta/rus)



Bupati Sidoarjo Subandi meresmikan RS Mitra Keluarga di Buduran.

RS Baru Berkapasitas 100 Bed Resmi Beroperasi

90 Persen Karyawan Warga Kota Delta

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi meresmikan RS Mitra Keluarga yang berlokasi di Jalan KH Ali Mas'ud, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Senin (12/1).

Peresmian dilakukan secara simbolis dengan prosesi penguntingan pita sebagai tanda peresmian. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Subandi menyampaikan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. "Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan seperti RS Mitra Keluarga ini, masyarakat Sidoarjo akan semakin terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat,

profesional, dan manusiawi," ujarnya.

Ia berharap RS ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

Direktur Regional RS Mitra Keluarga, dr Sri Mawarti menyampaikan, fasilitas baru ini merupakan rumah sakit ke-22 dalam jaringan Mitra Keluarga. Peresmian juga bertepatan dengan HUT ke-37 Mitra Keluarga. "Saat ini dengan hadirnya Mitra Keluarga Sidoarjo, maka 90 persen dari seluruh karyawan Mitra Keluarga Sidoarjo adalah warga dari Sidoarjo," ujarnya. (sud/kri/san/epe)

Lapas IIA Sidoarjo Gelar Tes Urine

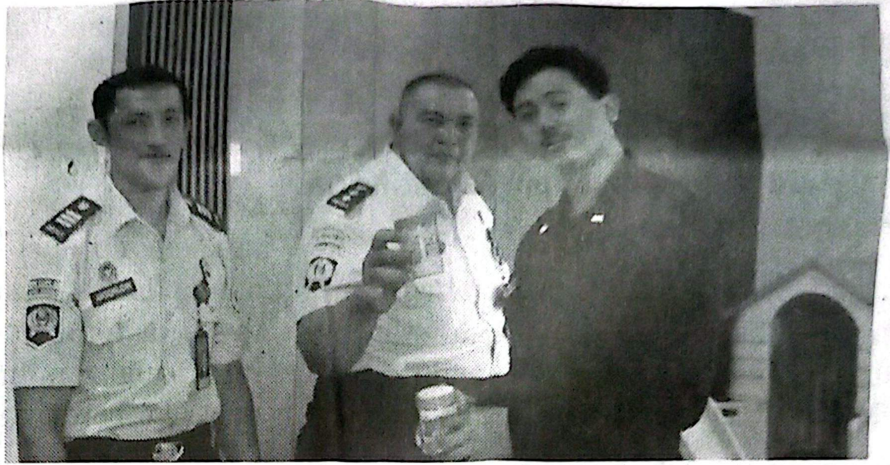
Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Mengawali tahun 2026, Lapas Kelas IIA Sidoarjo menunjukkan komitmennya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Seluruh pegawai, tanpa terkecuali, mengikuti tes urin sebagai upaya memastikan institusi pemasyarakatan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan bentuk keseriusan institusi dalam menjaga marwah organisasi pemasyarakatan.

Ia mengatakan, tes urin ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Sidoarjo untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari narkoba. "Ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi langkah penting untuk menjaga integritas seluruh pegawai," cetus Disri, Selasa (13/1).

Kegiatan tes urin tersebut dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas IIA Sidoarjo dan diikuti seluruh jajaran pegawai, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.



Seluruh pegawai Lapas IIA Sidoarjo melakukan tes urine.

Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi, transparan, serta berada di bawah pengawasan ketat untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses.

Tes urin ini menjadi bagian dari langkah preventif Lapas Sidoarjo dalam mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba.

Menurutnya, pegawai pemasyarakatan memiliki peran strategis dan harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba menjadi

fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal.

"Pegawai pemasyarakatan harus menjadi contoh di tengah masyarakat," tambahnya.

Ia menambahkan, lingkungan kerja yang bersih dari narkoba adalah syarat utama untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Melalui kegiatan tes urin ini, Lapas Kelas IIA Sidoarjo berharap seluruh pegawai semakin memperkuat komitmen untuk menjauhi narkoba, menjaga profesionalisme, serta terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat. (cat/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Entas Kemiskinan, Pemkab dan Baznas Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Sidoarjo, Bhirawa

Pemkab Sidoarjo kerja sama dengan Baznas Sidoarjo terus menargetkan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni oleh warga miskin di Sidoarjo. Wakil Ketua Baznas Sidoarjo, M.Ilhamudin, mengatakan dalam Bulan Januari 2026 ini sudah ada sebanyak 10 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan rehab.

Baznas Sidoarjo, belum lama ini, telah mendampingi Bupati Sidoarjo Subandi, yang melihat langsung RTLH milik 4 warga yang ada di 3 kecamatan, sekaligus akan dimulai proses rehabnya.

Di antaranya, 2 RTLH di Kecamatan Krian, tepat nya di Desa Tropodo dan Kelurahan Krian, 1 RTLH di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu, dan 1 RTLH di Desa Sawohan Kecamatan Buduran.

“Saya minta kalau bisa dalam Bulan Januari ini rehab untuk RTLH warga miskin ini bisa diselesaikan. Agar mereka bisa hidup dengan aman, nyaman, apalagi saat ini musim penghujan. Takutnya karena kondisinya tidak layak huni, kondisi rumah mereka akan banjir air hujan,” komentar Bupati Subandi, didampingi Wakil Ketua Baznas Sidoarjo M.Ilhamudin, saat berada di Desa Sawohan Kecamatan Buduran.



Bupati Subandi didampingi Camat Buduran dan Wakil Ketua Baznas Sidoarjo ketika berada di rumah warga Desa Sawohan Kecamatan Buduran.

Camat Buduran, Suprayitno, ikut hadir mendampingi Bupati Subandi, saat melihat kondisi RTLH yang ada di Desa Sawohan, kecamatan Buduran.

Kondisi rumah warga, parah. Karena atap rumah tidak ada sama sekali. Karena dimakan rayap.

Di desa lainnya, Bupati Subandi, juga melihat sendiri rumah warga yang tidak layak huni tersebut. Di

Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu, atap rumah sudah jebol. Saat hujan turun, air hujan merendam sebagian dari rumah.

Di Desa Tropodo Kecamatan Krian, dirinya melihat struktur bangunan rumah sangat rapuh, dimakan usia, karena rumah dibangun sejak tahun 1977 silam. Pemilik rumah setiap hari tidur di ruang tamu.

Bupati Subandi mengatakan

program RTLH di Kabupaten Sidoarjo tujuannya memang agar warga di Sidoarjo bisa hidup sejahtera dengan tinggal di rumah yang layak huni.

Disampaikan program rehab RTLH di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari banyak program di Pemkab Sidoarjo untuk mengentaskan derajat kemiskinan warga di Kabupaten Sidoarjo. [kus.ca]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo



LOETFI/DUTA

Peresmian Dapur SPPG 001 di Desa Temu, oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Selasa (13/1/26),

Wabup Resmikan Dapur SPPG 001 di Desa Temu

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 001 di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Peresmian dapur perdana tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Selasa (13/1/26).

Peresmian Dapur SPPG 001 disambut antusias oleh para siswa sekolah dasar di Desa Temu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Temu serta jajaran terkait yang mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis di wilayah Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyampaikan bahwa Dapur SPPG 001 merupakan dapur pertama yang secara resmi diresmikan di Kabupaten Sidoarjo. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meresmikan dapur-dapur SPPG lainnya secara bertahap.

"Dapur SPPG ini merupakan yang pertama diresmikan di Sidoarjo. Selanjutnya akan menyusul peresmian

Dapur SPPG 002 dan dapur-dapur lainnya," ujar Mimik Idayana.

Ia menjelaskan, Kabupaten Sidoarjo menargetkan pembangunan sekitar 370 dapur SPPG guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga saat ini, sebanyak 56 dapur telah beroperasi dan melayani sasaran program.

"Target dapur SPPG di Sidoarjo sekitar 370 unit. Saat ini yang sudah berjalan sebanyak 56 dapur. Data ini akan terus kami sesuaikan seiring perkembangan di lapangan," jelasnya.

Mimik menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan seluruh dapur SPPG dapat rampung dan beroperasi penuh pada tahun 2026 agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana secara menyeluruh.

foto Ia menambahkan, dapur-dapur SPPG yang telah beroperasi saat ini dinilai telah memenuhi standar, mulai dari proses pengolahan makanan, pengemasan, hingga sistem kerja yang terintegrasi.

Meski demikian, cakupan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sidoarjo saat ini baru menjangkau sekitar 25 hingga 35 persen dari total target. Oleh karena itu,

percepatan pembangunan dapur SPPG terus dilakukan.

"Kita upayakan dan harus kita kebut agar Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo bisa tercapai 100 persen," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah titik, khususnya di lingkungan yayasan, yang belum memiliki dapur MBG. Pemerintah daerah pun mendorong pihak yayasan untuk segera melakukan sosialisasi serta menyusun perencanaan pembangunan dapur MBG di masing-masing lokasi.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan serta perhatian terhadap kondisi kesehatan anak, seperti potensi alergi terhadap makanan tertentu.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola dapur, yayasan, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus di Kabupaten Sidoarjo. • Loe

PERLU
PENANGANAN:
Sampah plastik
memenuhi sungai
di dekat JPO
Jenggolo.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Warga Keluhkan Sampah Menumpuk di Sungai Dekat JPO Jenggolo

SIDOARJO -Tumpukan sampah terlihat menutupi aliran sungai di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jenggolo. Kondisi itu dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu pemandangan.

Dalam pantauan *Jawa Pos*, sampah didominasi plastik, styrofoam dan limbah rumah

tangga yang tersangkut di sepanjang bantaran serta bawah jembatan. Salah satu warga Hermanto mengatakan penumpukan sudah terjadi cukup lama dan makin parah saat hujan. "Kalau hujan deras, baunya menyengat dan aliran air tersumbat," katanya kemarin (13/1).

Sekretaris Camat (Sekcam) Sidoarjo Kota Dharma Putro

Prakoso akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Dia menyebut persoalan kebersihan sungai menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan kenyamanan warga. "Kami akan berkoordinasi dengan kelurahan setempat dan dinas teknis agar penanganannya bisa segera dilakukan," ujarnya. (ful/hen)

Jawa Pos



BAKAL JALANI PEMBINAAN: Juru parkir memberikan kartu kepada warga yang akan berolahraga di GOR Delta Sidoarjo.

ANDIEN BORDAHU/JAWA POS

Cegah Kecurangan, Dishub Siapkan Bimtek untuk Jukir

Bakal Disanksi jika Melanggar

SIDOARJO -Perlu pengawasan yang ketat terhadap juru parkir (jukir) di Kota Delta. Sebab belum semuanya berlaku jujur. Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo bakal memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan menyiapkan sanksi jika curang.

Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki menjelaskan jika instansinya bakal melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan polisi untuk menertibkan jukir. Langkah tersebut untuk menjawab keresahan masyarakat. "Kalau masih ada yang bermain, pasti akan kami tindak," tegas Budi.

Saat ini, lanjut dia, dishub juga mulai memetakan 208 titik parkir resmi yang kini berada di bawah

pengelolaan pemerintah daerah. Jumlah itu melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 86 saat masih dikelola pihak swasta. Artinya ada penambahan 122 titik parkir yang kini masuk dalam kendali Dishub.

Dari 208 titik itu, sebagian akan dilebur karena saling berdekatan. "Ini bukan sekadar menambah titik, tetapi menata supaya pengelolaannya lebih tertib dan potensi pendapatan bisa optimal," katanya.

Dishub juga memetakan zona parkir dengan potensi setoran terbesar. Kawasan Sidoarjo 1 yang mencakup sebagian wilayah kota ditambah Gedangan dan Buduran. Disusul Sidoarjo 2 yang meliputi Jalan Gajah Mada ditambah Candi dan Tanggulangin. Serta tiga wilayah potensial lainnya seperti Porong, Krian dan Taman. (ful/hen)

Jawa Pos

1.025 Calon Jemaah Belum Lunasi Bipih

Kemenag Bahas Pemberangkatan CJH Cadangan

SIDOARJO – Belum semua calon jemaah haji (CJH) yang terdaftar di pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahap kedua melunasi kewajibannya. Dari 1.706 CJH yang berhak lunas, hanya 681 calon jemaah yang membayar. Kemenag Sidoarjo masih membahas soal opsi jemaah cadangan berangkat.

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo mencatat total calon jemaah haji (CJH) yang telah melunasi Bipih pada tahap pertama dan kedua mencapai 2.927 orang. Data tersebut telah disetorkan ke Kementerian Haji dan Umrah untuk proses verifikasi lanjutan sebelum pra-manifest.



Hingga hari terakhir masa pelunasan, baru 681 CJH yang telah menyelesaikan pembayaran."

Imam Mukozali
Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo Imam Mukozali menjelaskan, pada pelunasan Bipih tahap

kedua ada 1.025 CJH yang belum membayar. "Hingga hari terakhir masa pelunasan, baru 681 CJH yang telah

menyelesaikan pembayaran," kata Imam kemarin (13/1).

Tunggu Kuota Resmi

Imam mengatakan, seluruh data pelunasan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Haji dan Umrah. Selanjutnya, Kemenag Sidoarjo masih menunggu proses verifikasi dari kementerian serta penetapan pra-manifest untuk mengetahui daftar jemaah yang berangkat.

"Karena kalau dari Jatim jumlah yang melunasi sudah 43.000 lebih diatas kuota Jatim yaitu 42.053 CJH," katanya. Dia menjelaskan data pasti soal kuota yang berangkat masih menunggu pemerintah pusat.

"Termasuk penetapan jemaah cadangan untuk mengisi kekosongan apabila terdapat jemaah yang mendadak batal berangkat," pungkas Imam. (eza/hen)

Jawa Pos

Kades Sebut Pembangunan Gedung Koperasi Telah Melalui Musyawarah

Masih Ada Penolakan Alih Fungsi Lapangan

SIDOARJO – Upaya mediasi antara pemerintah desa dan warga yang menolak alih fungsi Lapangan Sidorejo, Krian, untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum membuahkan kesepakatan. Pertemuan yang digelar Senin (12/1) malam itu buntu karena warga tetap meminta pemindahan lokasi KDMP

dan tidak setuju di lapangan.

Kepala Desa Sidorejo Heri Sucipto mengungkapkan bahwa pemdes telah mengumpulkan warga yang keberatan untuk mencari solusi. "Pertemuan semalam (Senin malam, Red) masih belum ada hasil pasti. Kami berencana menggelar pertemuan lanjutan," ujarnya kemarin (13/1).

Heri menegaskan penentuan lokasi pembangunan KDMP telah melalui prosedur yang berlaku. Pemerintah

desa, kata dia, sudah dua kali menggelar musyawarah desa (musdes). "Kami sudah musdes sebelum pembangunan mulai dari penjarangan calon lahan hingga penetapan lokasi di Lapangan Sidorejo yang merupakan tanah kas desa (TKD)," ujarnya.

Tiga Alternatif

Menurutnya, dalam musdes pertama sempat muncul tiga alternatif lokasi. Yakni di belakang balai desa, kawasan pedukuhan dekat masjid,

serta Lapangan Sidorejo. Dari hasil musdes lanjutan yang digelar pada pertengahan November, lokasi di Lapangan Sidorejo akhirnya ditetapkan dan kini progres pembangunan telah mencapai sekitar 17 persen.

Perwakilan warga Dusun Madubronto Ardi mengatakan, warga tetap berharap lokasi pembangunan bisa dipindah. "Harapan kami tetap pindah dan sudah usulkan dari rapat semalam," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo

Jawa Pos • METROPOLIS | RABU 14 JANUARI TAHUN 2026 | HALAMAN 18

Rusunawa Tambaksawah Baru Dikelola Pemkab 2024

Setelah
Dihibahkan
Pemerintah Pusat
pada 2014

SIDOARJO – Sejak dihibahkan pemerintah pusat tahun 2014, Rusunawa Tambaksawah tidak langsung dikelola Pemkab Sidoarjo. Bangunan itu baru secara resmi diurus sepenuhnya

pemkab tahun 2024. Lebih tepatnya setelah persoalan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah mendapat sorotan aparat hukum.

Kepala UPTD Rusunawa Nanang Budiarto mengungkapkan bahwa Rusunawa Tambaksawah sebelumnya dikelola swasta. Itu berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) lama. Nanang mengaku baru mengetahui status Rusunawa Tambaksawah

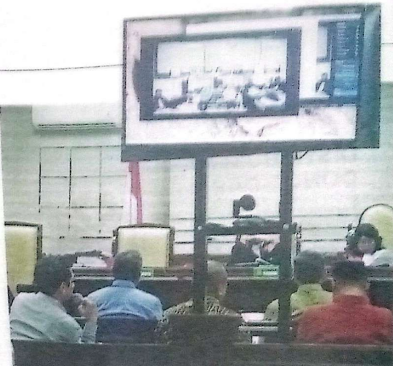
sebagai aset daerah setelah terbit SK (Surat Keputusan) tahun 2018.

Hal tak jauh berbeda disampaikan Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Bachruni Aryawan. Dia menjelaskan memang tidak ada SK dan pedoman pengelolaan rusunawa dari PKS yang disepakati pada 2006 dan 2010. Hak dan kewajiban baru jelas di tahun 2023 saat pengelolaan ditarik pemkab.

Perjanjian Ditandatangani 2006

Dalam sidang yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Senin (12/1) sore. Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso juga dihadirkan. Win menjelaskan Rusunawa Tambaksawah merupakan barang milik daerah yang berasal dari hibah pemerintah pusat.

Dia menyebut PKS pengelolaan rusunawa ditandatangani pada 2006 dan diperbarui pada 2010 saat dirinya menjabat bupati. Namun, Win mengaku tidak ingat secara pasti apakah pernah menerbitkan SK yang menetapkan Rusunawa Tambaksawah sebagai aset daerah maupun menandatangani detail teknis pengelolaannya. (eza/hen)



PERSIDANGAN: Sidang korupsi Rusunawa Tambaksawah di Pengadilan Tipikor menghadirkan mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Senin (12/1) sore.

Jawa Pos

Polisi dan Omah Rembug Mediasi Masalah Warga Tanjungsari

Sidoarjo, Memorandum

Upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif terus dilakukan Polsek Taman. Salah satunya melalui pendekatan dialogis dan problem *solving* yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsari, Aipda Dwi Priyo, bersama pengurus Omah Rembug.

Bertempat di Omah Rembug, Selasa (13/1), musyawarah digelar sebagai wadah untuk membahas sekaligus mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi warga. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aipda Dwi Priyo bersama pengurus Omah Rembug mendengarkan aspirasi, keluhan, serta permasalahan warga untuk kemudian dicarikan solusi terbaik bersama.

"Setiap permasalahan warga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi

yang baik. Dengan mengedepankan kekeluargaan, kita bisa menemukan solusi yang adil dan tidak menimbulkan konflik baru," ujar Aipda Dwi Priyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga komunikasi, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, warga diminta tidak ragu untuk melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau pihak kepolisian apabila menemukan permasalahan yang berpotensi mengganggu



Proses mediasi warga Tanjungsari yang dihadiri bhabinkamtibmas di Omah Rembug.

keamanan lingkungan.

Pengurus Omah Rembug menyambut baik kehadiran dan peran aktif bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

Apalagi selalu mengedepankan penyelesaian masalah secara humanis. "Melalui Omah Rembug, kami berharap setiap persoalan warga bisa disele-

saikan secara damai, adil, dan bermartabat tanpa harus menempuh jalur hukum," ungkap salah satu pengurus Omah Rembug. (sud/kri/san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Golkar Sidoarjo Cari Solusi Penanganan Banjir Tahunan Lewat FGD

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Sebagai langkah strategis mengurai persoalan banjir di kota Delta, DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan menghadirkan Kepala Bappeda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si. serta Umi Latifah Narsum ahli tata ruang dari Surabaya.

FGD yang digelar di aula kantor DPD Partai Golkar pada Sabtu (10/1/2026) sore ini, dihadiri langsung ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi M.Pd, serta perwakilan dari partai partai yang ada di Sidoarjo.

Selain itu, terlihat juga perwakilan akademisi, LSM dan media, yang turut terli-



bat dalam diskusi membedah persoalan banjir ini.

Dalam sambutannya, Adam Rusydi menegaskan tujuan utama dari diskusi ini, adalah mencari solusi atas persoalan banjir di Sidoarjo yang hampir terjadi tiap musim hujan tiba.

Karenanya dia berharap, paparan strategi pemenangan banjir yang disuguhkan oleh Bappeda kabupaten Sidoarjo, bisa memberikan pencerahan soal masalah banjir.

“Kita juga berharap ada langkah strategis yang mendapat dukungan penuh dari legislatif, agar persoalan banjir di Sidoarjo bisa terurai,” jelasnya.

Dalam paparannya, Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si. Kepala Bappeda kabupaten Sidoarjo memberikan gambaran gambaran rencana jangka pendek menengah dan panjang, bagaimana solusi untuk mengatasi banjir.

Diantarnya adalah mem-

bangun embung sebagai penampung air, agar tidak terjadi genangan di wilayah padat penduduk.

Termasuk juga kerja sama antar instansi dan menggugah kepedulian seluruh elemen masyarakat, dalam menuntaskan masalah banjir.

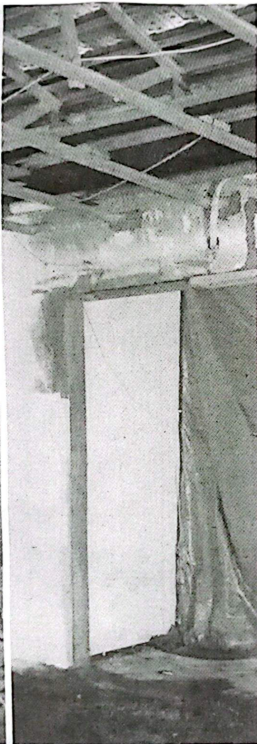
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, banyak membedah soal masalah krusial strategis penanganan banjir, terutama soal anggaran dan kondisi wilayah Sidoarjo. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG LAKTASI
TOILET DISABILITAS
LOKASI : KANTOR DINAS PERIKANAN K
NOMOR KONTRAK : 000.5/VI.25/02/PL-PPK/05-1/438.1
TANGGAL KONTRAK : 25 NOVEMBER 2015
NILAI KONTRAK : Rp. 183.201.195,00
PELAKSANA : CV. MAJANG JAYA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. EL SHADIDAI KONSULTAN

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESERIFAT



Ketua LSM AMPK: Kadis Perikanan Melempem Tidak Berani Sanksi Proyek Laktasi Perikanan Molor Dikartu Merah

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti diberitakan sebelumnya di Harian Pojok Kiri Rehab proyek laktasi dinas perikanan dan kelautan molor tidak selesai hingga sampai berita ini munculkan dan anehnya semua pekerja proyek saat ditanya terkait keterlambatan kegiatan semua memberikan jawaban yang sama, tidak tahu pak. Oleh karena itu ketua LSM Aliansi Masyarakat Perancis Korupsi (AMPK) Solik meminta pada Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo, Yunan yang baru dilantik bupati, Sabtu, 10/1/26 untuk bertindak tegas menjatuhkan kartu merah pada kontraktor pelaksana, Ucap Solik pada wartawan, Minggu, 11/1/26.

Namun sayang sekali Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo, tidak tegas alias melempem tidak berani menjatuhkan kartu merah pada kontraktor ‘Sontoloyo’ itu, tegas Solik.

Sedangkan dinas terkait saat wartawan investigasi pada tgl 6/1/2026 jam 2.30 pihak resepsionis langsung menanyakan pak mau ke mana dan dari mana? Mohon maaf saya dari wartawan mau konfirmasi ke seketaris terkait kegiatan proyek rehab di sebelah yang belum selesai, jawab wartawan.

Pihak resepsionis langsung menjawab Bu seketaris tidak ada di tempat dan pejabatnya semua gak ada di dalam kosong mas, tegas resepsionis.

Maaf PPK om bukan Bu seketaris, tadi di info dari orang dalam katanya Dika, tapi Dika juga gak ada di kantor pak, keluar ke mana? Terus siapa yang bisa dikonfirmasi, dia mengatakan saya gak tahu pak, saya ini seorang penjaga terkait keluar masuknya tamu? tegasnya.

Sementara dari hasil investigasi di lokasi proyek Laktasi tampaknya proyek itu kental dari unsur KKN, untuk Solik akan Pilkada dan Pulbaket dan jika ada unsur mendukung tindakan pidana korupsi ia akan laporkan ke Kejaksaan maupun ke Polres ta Sidoarjo, ucap Solik ketua LSM AMPK, dengan nada geram pada wartawan, Kamis, 8/1/25. (Lik/Bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMBANGUNAN PLENSENGAN WILAYUT ANGGARAN APBD TAHUN 2025 DIDUGA TABRAK REGULASI KENTAL KORUPSI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Banyaknya proyek yang dibiayai APBD Sidoarjo banyak permasalahan baik itu pekerjaan yang dilakukan secara lelang maupun pekerjaan secara penunjukan langsung (PL).

Pekerjaan fisik yang masih banyak yang belum selesai hingga awal tahun 2026 ini, baik pekerjaan lelang maupun pekerjaan penunjukan langsung, ini sesuai fakta lapangan yang telah disurvei langsung oleh wartawan pojok kiri. Sedangkan yang paling menarik dan tidak banyak orang tahu, bahwa ada pekerjaan anggaran APBD tahun 2025,

belum tanda tangan kontrak, pekerjaan sudah ada yg menjadi 70% hasil pekerjaannya. Permainan ini diduga ada konspirasi/kongkalikong antara kontraktor dengan oknum dinas terkait untuk meraup uang haram ini, ucap salah satu pegiat sosial DH pada wartawan, Selasa, 13/1/26. Sedang yang jadi pertanyaan apakah hal seperti ini diperbolehkan dalam aturan dari kementerian pekerjaan umum atau peraturan daerah atau bupati selaku kepala daerah?

Wartawan pojok kiri mempertanyakan hal ini kepada seorang kontraktor berinisial MH yang tidak

mau disebut nama lengkap, bahwa apa bila ada pekerjaan dari anggaran pemerintah jika itu pekerjaan pembangunan, itu tidak diperbolehkan. Dari mana dia tahu bahwa pekerjaan itu dikerjakan olehnya kalau kontrak kerjanya belum ditanda tangani? Berarti disini ada permainan antara kontraktor dengan oknum pihak dinas.

Dalam pekerjaan anggaran tahun 2025, ada beberapa titik pekerjaan yang ditemui wartawan pojok kiri yang melakukan pekerjaan namun belum ada tanda tangan kontrak yang diduga dikerjakan CV Duta Perkasa. (Tim/Bersambung)



Pekerjaan hingga tahun berganti tidak selesai.

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT